



Pengaruh Pengelola Keuangan Daerah Dan Audit Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat)

Hamidah^{1*}, Dina Adawiyah², Dica lady silvera³

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

²Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

³Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: hamidah20lubis@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the Influence of Regional Financial Managers and Internal Audit on Local Government Performance. This type of research uses quantitative methods. The research population is the DPRD Secretariat and the Regional Secretariat of West Pasaman Regency. The data source uses primary data collected directly from respondents by distributing questionnaires. Sampling used purposive sampling with a total sample of 36 people. From the test it is known that Regional Financial Managers partially significantly affect Regional Government Performance where the sign is $(0.000 < 0.05)$. Internal Audit partially significantly influences Government Performance where the number is significant $(0.000 < 0.05)$. Regional Financial Managers (X1), and Internal Audit (X2) together significantly influence Local Government Performance (Y) where the number is significant $(0.000 < 0.05)$*

Keywords: *the influence of Local Financial Management, Internal Audit and Local Government Performance.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis mengenai Pengaruh Pengelola Keuangan Daerah dan Audit Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian yaitu Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Sumber datanya mempergunakan data primer dikumpulkan langsung dari responden dengan menyebarkan angket. Pengambilan sampel mempergunakan purposive sampling dengan total sampelnya berjumlah 36 orang. Dari pengujian diketahui Pengelola Keuangan Daerah secara parsial signifikan memengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah dimana signya $(0,000 < 0,05)$. Audit Internal secara parsial signifikan memengaruhi Kinerja Pemerintah dimana angka signya $(0,000 < 0,05)$. Pengelola Keuangan Daerah (X₁), dan Audit Internal (X₂) secara bersama signifikan memengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (Y) dimana angka signya $(0,000 < 0,05)$.

Kata Kunci: Pengaruh Pengelola Keuangan Daerah, Audit Internal dan Kinerja Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Era reformasi yang diawali di tahun yang silam sudah menjalar hampir ke seluruh elemen kehidupan di Indonesia. Semenjak terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999 agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif, efisien serta bertanggungjawab telah diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan otonomi daerah tidak saja dilandaskan dari pedoman hukum, tapi merupakan penerapan desakan globalisasi yang perlu dikembangkan lewat cara menyerahkan kewenangan lebih luas pada daerah, lebih ril serta penuh tanggungjawab, khususnya untuk mengatur, memanfaatkan serta mencari sumber potensial pada wilayahnya sendiri. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah (Siregar, 2017: 75).

Pelimpahan wewenang ini berkaitan upaya merencanakan, mendanai, serta melimpahkan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari aparaturnya adalah pusat di daerah, dan hingga ke tingkatan di bawahnya. Pemerintah Daerah adalah suatu alat pada struktur penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu daerah. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, desakan atas perombakan organisasi publik mulai dari individu hingga kelompok begitu diharapkan, perombakan ini cenderung difokuskan untuk pemerintah daerah berkaitan dengan prestasi kerja untuk instansi. Kinerja merupakan hasil yang bisa diraih individu maupun kelompok di sebuah instansi, menurut wewenang serta tanggungjawabnya tersendiri dalam upaya meraih sasaran instansi dengan cara legal, tidak melawan hukum serta ada kesesuaian moral dan etika (Rusdi, 2020, hal, 1).

Menurut (Hendra, 2017 hal,10) pengelolaan keuangan Daerah merupakan semua aktivitas pejabat pengelola keuangan daerah berdasarkan kedudukan serta kewenangannya yang mencakup aktivitas dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi serta bertanggung jawab. Audit internal juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Audit internal pemerintah mempunyai peran yang memengaruhi sebab merupakan pihak yang melakukan pengawasan dan perlu menjaga agar seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur agar kualitas informasi dapat terjaga. Pada penelitian ini penulis fokus terhadap Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Sekretariat DPRD Pasaman Barat adalah elemen pelayanan administrasi serta mendukung setiap tugas serta fungsi DPRD. Sedangkan Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan fungsinya yaitu untuk mengkoordinasikan semua satuan perangkat kerja pemda guna menunjang kebijakan kepala daerah sehingga bisa memenuhi desentralisasi serta tugas pembantuan.

Berdasarkan laporan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Ginanjar Cahya permana melalui Kasi Intel Elianto di Simpang Empat, menemukan bahwa anggaran perjalanan dinas sekwan DPRD Kabupaten Pasaman Barat di 2018 dan 2019 masih terdapat kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu adanya kesalahan penganggaran, yakni anggaran perjalanan dinas sekwan DPRD Kabupaten Pasaman Barat di 2018 yang terserap senilai Rp 19.995.475.482 dari keseluruhan anggaran senilai Rp 34.905.479.482. Sementara anggaran untuk tahun 2019 terserap senilai Rp 18.717.210.489 dari keseluruhan anggaran senilai Rp 32.015.823.405. Selain itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan pemberkasan serta mengajukan audit kerugian Negara. Kemudian anggota penyidik memberi kelengkapan berkas atas permintaan auditor untuk dasar perhitungan (Merdeka.com, 2021), dan juga berdasarkan keterangan dari Kasubag TU Keuangan Sekretariat DPRD (April, SH. MM)

Dalam penelitian (Lestari, S. F., & Hastuti, 2020) di Pemda Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa kompetensi SDM, implementasi sistem informasi pengelola keuangan daerah serta peran audit internal signifikan positif secara bersama memengaruhi kualitas

LKPD. Dalam penelitian Siti Irafah, Eka Nurmala Sari (2020) didapati hasilnya kompetensi SDM, peran internal audit, sertakesuksesan penerapan sistem informasi audit memengaruhi kualitas LKPD.

Berbeda dengan penelitian (Sapitri,W 2018) yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat”, yang menemukan (1) tidak ada pengaruh akuntabilitas pada kinerja aparatur pemerintah daerah, (2) ada pengaruh *value for money* pada kinerja aparatur pemda (3) tidak ada pengaruh kejujuran pada kinerja aparatur pemda (4) tidak terdapat pengaruh transparansi pada kinerja aparatur pemda dan (5) ada pengaruh pengendalian pada kinerja aparatur pemda.

Faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yaitu termasuk pengelola keuangan dan audit internal. Berdasarkan uraian di atas, peneliti berminat untuk meneliti judulnya “Pengaruh Pengelola Keuangan Daerah dan Audit Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan hasil yang bisa diraih individu maupun kelompok di sebuah instansi, menurut wewenang serta tanggungjawabnya tersendiri dalam upaya meraih sasaran instansi dengan cara legal, tidak melawan hukum serta ada kesesuaian moral dan etika (Rusdi, 2020, hal, 1). Kinerja merupakan pedanan kata dari *performance* artinya: (1) melakukan, menjalankan, melaksanakan dan (2) melakukan sesuatu yang diharapkan seseorang. Sehingga kinerja pemda artinya sejauh mana pemda tersebut mampu melaksanakan tugas-tugasnya.

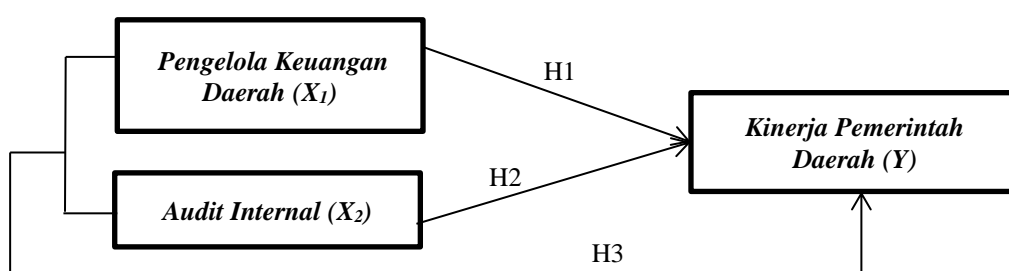
Pengelola Keuangan Daerah

Pengelola keuangan dalam PP No. 12 tahun 2019 tentang pengelola keuangan Daerah, merupakan segala aktivitas yang dimulai dari merencanakan, mengatur anggaran, melaksanakan, pengaturan tata usaha, melaporkan, mempertanggungjawabkan, serta mengawasi keuangan daerahnya dengan pengelola keuangan daerah. Menurut (Hendra, 2017 hal,10) pengelolaan keuangan Daerah merupakan segala aktivitas pejabat pengelola keuangan daerah berdasarkan kedudukan serta kewenangan yang dimilikinya mencakup aktivitas merencanakan, melaksanakan, mengawasi serta mempertanggungjawabkan.

Audit Internal

Auditor internal pada pemerintahan adalah inspektorat. Inspektorat daerah adalah aparat pengawas pemerintah daerah yang dikepalai oleh inspektur dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai tanggungjawab pada Bupati lewat Sekretariat Daerah. Menurut Heri (2017, hal, 238) audit internal merupakan sebuah fungsi penilaian yang dikembangkan secara mandiri di suatu instansi guna menguji serta memberi penilaian atas aktivitas dalam bentuk pelayanan pada organisasi atau instansi.

Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

Berikut hipotesis peneliti pada penelitian ini:

- H1: Diduga, secara parsial pengelola keuangan positif serta signifikan memengaruhi kinerja pemda.
- H2: Diduga, bahwa secara parsial audit internal positif signifikan serta memengaruhi kinerja pemda.
- H3: Diduga pengelola keuangan daerah dan audit internal positif serta signifikan secara simultan memengaruhi kinerja pemda.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mempergunakan cara mengumpulkan data lewat penelitian pustaka serta penelitian lapangan. Kepustakaan bersumber dari literatur serta artikel yang relevan. Sementara penelitian lapangan dikumpulkan lewat hasil angket pada responden.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, Penelitian ini mempergunakan wawancara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Sedangkan datanya berbentuk data primer langsung diambil dari responden (Mahmuda, Sucipto, & Setiawansyah, 2021).
- b. Kuesioner, merupakan seperangkat pertanyaan dipakai guna mendapatkan data dari respondennya.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data mempergunakan data kuantitatif berbentuk angka. Sementara sumber datanya didapatkan dari sumber primer yang didapatnya langsung dari sumber pertama yaitu responden.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah total atau himpunan obyek dengan ciri sama. Sugiyono (2016:80) mengartikan populasi merupakan suatu area generalisasi mencakup objek dan subjek dengan kualitas serta karakteristik tertentu dari peneliti agar dibahas lalu diambil simpulannya. Populasi penelitian yaitu orang yang bekerja di Sekretariat DPRD dan Sekretariat daerah totalnya 52 responden.

Teknik penentuan sampel yang penulis gunakan adalah *purposive sampling*, yaitu cara menentukan sampel lewat sebuah kriteria tertentu (Sugiyono 2016:84). Kriteria pemilihan sampel yaitu orang yang bekerja pada bagian keuangan pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yaitu kepala bagian keuangan, kepala subbagian kebhendaharaan, kepala subbagian TU keuangan, bendahara pengeluaran, bendahara gaji, pembantu bendahara pengeluaran dan staf keuangan. Jumlah sampel keseluruhan berjumlah 36 sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas dipakai dalam menilai tingkat kevalidan sebuah kuesioner (Ghosali, 2018). Pada penelitian ini didapati seluruh butir kuesioner sudah valid dan bisa dilakukan uji lebih lanjut.

Uji Reabilitas

Tabel 1. Hasil Uji Reabilitas X1, X2, dan Y

Variabel	Jumlah item pertanyaan	Cronbach alpha	Rule of thumb	Keputusan
Pengelola Keuangan Daeah (X1)	15	0,883	0,5	Realiabel
Audit Internal (X2)	15	0,936	0,5	Realiabel
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	15	0,836	0,5	Realiabel

Sumber: Hasil output SPSS 25, diolah penulis (2022)

Dari tabel 1 diatas diketahui semua variabel menghasilkan angka *Cronbach's alpha* besar dari *rule of thumb* ($> 0,5$). Sehingga semua variabel dapat dianggap reliabel (bisa diterima).

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitis

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.78766340
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.145
	Positive	.094
	Negative	-.145
Test Statistic		.145
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Menurut tabel di atas, pengujian *Kolmogorov-Smirnov* angka *Asymp.Sig. (2-tailed)* nilai residual yang didapatkan senilai $0,054 > 0,05$. Artinya data pada model beresidual normal, sehingga model regresi layak atau dapat digunakan dalam penelitian.

b. Uji Multikolinearitas

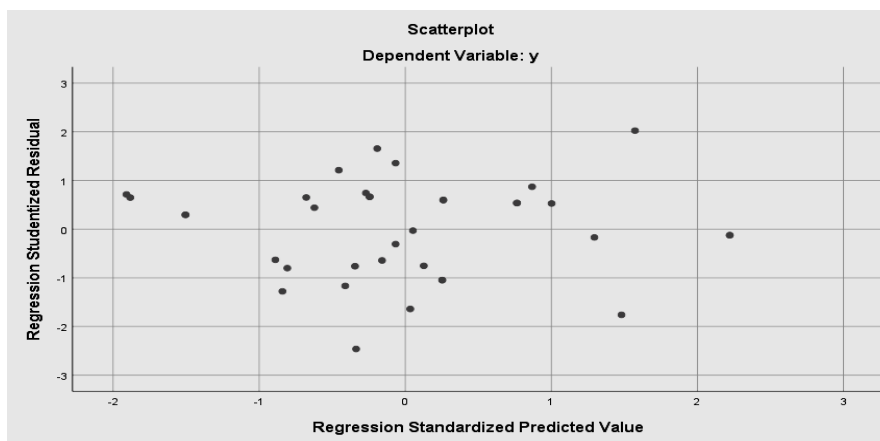
Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
x1	.989	1.011
x2	.989	1.011

a. Dependent Variable: y

Dari setiap variabel independent terlihat angka *VIF* < 10 serta *tolerance* $> 0,10$ sehingga dianggap model regresi linear berganda tidak ada persoalan multikolonieritas atau saling memengaruhi diantara variabel bebasnya.

c. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Menurut gambar scatterplot ditemukan tidak adanya struktur teratur dalam penyebaran datanya. Kemudian juga terjadi penyebaran di atas serta di bawah angka nol. Sehingga dianggap tidak ada persoalan heteroskedastisitas.

Metode Analisis

a. Analisis Regresi Berganda

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.768	4.846		.984	.332
	x1	.391	.065	.410	6.006	.000
	x2	.532	.046	.783	11.461	.000

a. Dependent Variable: y

Menurut hasil bisa ditarik persamaan regresinya sebagai berikut :

$$KP = 4,768 + 0,391 PP + 0,532 AI + e$$

1. Nilai konstanta sebesar 4,678 mengndikasikan bila variabel bebas pengelola keuangan daerah serta audit internal angkanya nol atau konstan, kinerja pemda nilainya 4,678
2. Koefisien pengaruh pengelola keuangan daerah sebesar 0,391, artinya ada keterkaitan positif pengelola keuangan daerah dengan kinerja pemda. Mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pengelola keuangan daerah suatu satuan dapat menaikkan kinerja pemda senilai 0,391 poin dimana variabel lainnya tetap.
3. Koefisien audit internal sebesar 0,532 yang artinya terdapat hubungan positif antara audit internal dengan kinerja pemerintah daerah. Sehingga mengindikasikan jika ada kenaikan satu poin audit internal, maka bisa meningkatkan kinerja pemerintah daerah 0,532 poin dimana variabel lainnya tetap.

b. Koefisien Determinasi

Tabel 5. Hasil Analisis Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.921 ^a	.848	.839	1.84104

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasarkan hasil didapati angka koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) = 0,839 = 83,9%. Yang menunjukkan Pengelola Keuangan Daerah serta Audit Internal mampu menjelaskan Kinerja Pemda sebesar 83,9%. Sedangkan sisanya sebesar 100% - 83,9% = 16,1% dijelaskan faktor lain yang belum dianalisis.

Metode Pengujian Hipotesis

a. Uji Student (Uji-t)

Dengan $n = 36$; $k = 2$; $df = 33$ ($36-2- 1$). Sehingga nilai t_{tabel} adalah 1,692. Berikut hasil pengujian uji t :

Tabel 6. Hasil Pengujian Uji t Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.768	4.846		.984	.332
	x1	.391	.065	.410	6.006	.000
	x2	.532	.046	.783	11.461	.000

a. Dependent Variable: y

Hasil pengujian untuk uji-t di atas bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengelola Keuangan daerah terhadap Kinerja Pemda
 Hasil uji Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah didapatkan angka t_{hitung} senilai 6,006 > t_{tabel} senilai 1,692. Kemudian signya 0,000 < 0,05. Artinya Pengelola Keuangan Daerah secara parsial positif signifikan memengaruhi Kinerja Pemda. **H1:Diterima**
2. Pengaruh Audit Internal terhadap Kinerja Pemda
 Hasil pengujian Audit Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah didapatkan angka t_{hitung} senilai 11,461 > t_{tabel} senilai 1,692. Kemudian signya 0,000 < 0,05. Artinya Audit Internal secara parsial positif signifikan memengaruhi Kinerja Pemda. **H2:Diterima**.

b. Uji Fisher (Uji-F)

Dengan $n = 36$; $k = 2$; $df = n-k-1 = 33$, dan nilai F-tabel adalah 3,28.

Tabel 7. Hasil Pengujian Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	623.149	2	311.575	91.926	.000 ^b
	Residual	111.851	33	3.389		
	Total	735.000	35			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x2, x1

Didapatkan angka F_{hitung} senilai 91,926 > F_{tabel} 3,28 level signifikan 0,000 dimana nilai signifikannya < 0,05. Dengan Demikian Pengelola Keuangan Daerah dan Audit Internal secara bersama positif memengaruhi kinerja Pemda. Hal ini diartikan **H3 :Diterima**

Pembahasan

1) Pengaruh Pengelola Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut hasil penelitian dengan uji t didapatkan statistik pengelola keuangan daerah dengan angka $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $6,006 > 1,692$ dan signifikannya adalah $0,000 > 0,05$, atau nilai tersebut kurang dari 0,05. Hal ini artinya pengelola keuangan daerah secara parsial positif signifikan memengaruhi kinerja pemda. Dengan kata lain semakin besar pengaruh pengelola keuangan daerah, kinerja pemerintah daerah juga akan semakin meningkat.

2) Pengaruh Audit Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut hasil penelitian dengan uji t didapatkan statistik audit internal dengan angka $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $11,461 > 1,692$ dan signifikannya adalah $0,000 > 0,05$, atau nilai ini kurang dari 0,05. Hal ini artinya audit internal secara parsial positif signifikan memengaruhi kinerja pemda. Dengan kata lain semakin besar audit internal kinerja pemda juga akan ikut meningkat.

3) Pengaruh Pengelola Keuangan Daerah dan Audit Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan kan hasil uji-F diperoleh F_{hitung} senilai $91,926 > F_{tabel}$ 3,28 lalu signifikan $0,00 < 0,05$. Yang menunjukkan H_3 diterima, artinya pengelola keuangan daerah serta audit internal positif signifikan secara bersama memengaruhi Kinerja pemerintah daerah. Kemudian koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) senilai 0,839 atau 83,9%. Hal ini berarti pengelola keuangan daerah dan audit internal dapat menjelaskan kinerja Pemda sebesar 83,9% sisanya yaitu $100\% - 83,9\% = 16,1\%$ diterangkan faktor yang lain. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelola keuangan daerah dan audit internal dapat menjelaskan secara bersama pengaruhnya pada kinerja pemerintah daerah di Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Menurut pengujian serta pembahasan, peneliti menyimpulkan:

1. Pengelola keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} $6,006 > t_{tabel}$ 1,692 dan signya $0,000 < 0,05$ serta nilai Beta senilai 0,410. Hasil ini menunjukkan ada pengaruh antara pengelola keuangan daerah dengan kinerja pemda yang dilakukan. Oleh sebab itu, hipotesis (H_1) diterima.
2. Audit internal secara parsial signifikan memengaruhi kinerja pemda pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} sebesar $11,461 > 1,692$ dengan nilai signifikan sebesar 0,000 dimana nilai signifikan $< 0,05$ dan nilai Beta senilai 0,783. Hasil ini menunjukkan terdapat pengaruh antara audit internal dengan kinerja pemda yang dilakukan. Sehingga, hipotesis (H_2) diterima.
3. Pengelola keuangan daerah dan audit internal signifikan secara simultan memengaruhi kinerja pemda pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F_{hitung} $91,926 > F_{tabel}$ 3,28 dan signifikansi senilai 0,000 dimana nilai signifikannya $< 0,05$. Hasil inimenunjukkan bahwa secara simultan pengelola keuangan dan audit internal memengaruhi kinerja pemda. Sehingga, hipotesis (H_3) diterima.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi organisasi atau instansi peneliti menyarankan agar dapat mempertahankan dan dapat meningkatkan pengelola keuangan dan audit internal agar kinerja pemerintah daerah lebih baik lagi kedepannya
2. Penelitian berikutnya disarankan agar memperkaya kajian dan sampel penelitian dengan memperluas sampel dari pegawai instansi pemda yang lebih banyak lagi
3. Peneliti berikutnya juga bisa membuat penambahan variabel atau perubahan variabel penelitian agar ditemukan prediktor lain yang kuat memengaruhi kinerja pemda.

Peneliti berikutnya juga disarankan untuk meneliti objek lain yang berhubungan dengan pengaruh pengelola keuangan dan audit internal terhadap kinerja pemerintah daerah.

REFERENSI

- Agoes, S. (2017). *Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik Buku 1 Edisi 5*. Salemba Empat.
- Agussalim, M. (2015). *Statistik Lanjutan*. Ekasakti Press.
- Alexander, A. (2022). *Akuntansi manajemen pada entitas publik*. penerbit adab.
- Arikunto. (2010). *Prosedur metodologi penelitian suatu pendekatan praktisari*. rhineka cipta.
- Candra, ananda fajri. (2020). *Pembangunan ekonomi*. inteligencia media.
- Ghozali, I. (2018). *Applikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS 25*. Badan Penerbit universitas diponegoro.
- Gunawan, C. (2018). *Mahir Menguasai SPSS (Mudah Mengolah Data dengan IBM 25)*. CV Budi Utama.
- Hendra, K. (2017). *carut marut pengelola keuangan daerah di era otonomi daerah*. kencana jl. kebayunan no 1.
- Heri. (2017). *Auditing dan Asurans Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Standar Internasional*.
- Rusdi, fauzi akhmad dan hidayat. (2020). *manajemen kinerja*. airlangga university press.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabet.
- Valery G. Kumaat. (2016). *Internal Audit*. Erlangga.
- Dewi, M. D. K., & Yuniasih, N. W. (2020). Pengaruh Kemampuan Pengelola Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi, terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Bali Dengan Sistem Pengendalian Intren Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1 (1), 793-767.
- Lestari, S. F., & Hastuti, H. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Jurnal In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 11 No, 820–827.
- Mahmuda, S., Sucipto, A., & Setiawansyah, S. (2021). Pengembangan Sistem Informasi Pengolahan Data Tujangan Karyawan Bulog (TKB) (Studi Kasus Perum Bulok Devisi Regional Lampung). *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi*, 1(1), 14–23.
- Merdeka.com. (2021). *Kasus Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Pasaman Barat Naik ke Penyediaan*. (diakses 01/12/2021)
- Prisilia, N, A. (2017) Analisis Pengaruh Kinerja pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Dengan *Balance Scorecard* (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai
- Rismawati, L., Hakiki, A., & Gozali, E. O. D. (2020). Peran Audit Internal dan Kapasitas SDM Organisasi Perangkat Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten Empat Lawang). *Jurnal (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University)*.
- Safitri, A. R. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kesuksesan Penerapan Sistem

Informasi Pengelola keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintahan Daerah Kota Jambi). *Jurnal Doctoral Dissertation Magister Ilmu Akuntansi*.